



JAKARTA, Kamis 16 Agustus 2018. Bertempat di Ruang Rapat Nila Lt. 15 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilangsungkan Rapat Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan, Obat Ikan dan Usaha Pembudidayaan Ikan. Seminar diikuti oleh berbagai unsur diantaranya Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perekonomian, Direktur dan Kasubdit lingkup Kementerian KKP, ASOHI, Hiperkirindo, Hipilindo, *Shrimp Club* Indonesia, Asosiasi Pengusaha *Catfish* In

donesia, Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia, Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ikan Sidat Indonesia, beberapa perwakilan perusahaan anggota Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, Aspakindo, dll.

Acara ini dihadiri Ketua Sub. Bidang Obat Ikan ASOHI, Wawan Siswanto, Spi. Acara diawali dengan pemaparan mengenai aturan terbaru OSS dan integrasinya dengan proses perijinan di KKP oleh tim Subdit Usaha perikanan, Subdit Obat Ikan dan Pakan Ikan.

OSS merupakan kepanjangan dari

Online Single Submission

yang merupakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Setelah pendaftaran dilakukan pengusaha akan menerima Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

Menurut Wawan Siswanto pemaparan mengenai perundangan tidak dibahas detail mengingat keterbatasan waktu, tim KKP hanya membahas integrasi masing-masing subdit dengan ketentuan baru mengenai OSS. Namun begitu, disepakati untuk peserta memberikan masukan kurang lebih satu pekan kedepan untuk dibahas kembali oleh tim KKP.

Beberapa isu utama selama diskusi yaitu penerapan OSS yang masih banyak kendala di lapangan, pengisian form yang masih belum semuanya jelas, sistem OSS yang masih belum berjalan lancar. Serta banyak

item-item

dalam isian OSS yang tidak bisa mengakomodir beberapa bidang usaha terutama untuk pengusaha budidaya perikanan. "Sistem OSS yang mengintegrasikan satu perusahaan dengan semua bidang usaha membuat beberapa perwakilan perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha ada kekhawatiran apabila ada kegagalan tertentu mengakibatkan kendala perijinan," jelas Wawan.

(WK)